

LAMPIRAN

Dialog Mata Najwa Episode UU Cipta Kerja Part 1 Mana Fakta Mana Dusta

Narasi Pembuka:

Setahun Usai polemic revisi UUD KPK demonstrasi berskala massif dan serentak kembali melanda. Kali ini akibat pembahasan undang-undang cipta kerja, peraturan sapu jagad yang merevisi banyak biled lama. Proses penyusunan yang seba kilat dan tergesa menumbuhkan syakwa sangka dari segenap warga.

Transparansi dan akuntabilitas yang di abaikan tercermin dari ragam draft yang tak jelas jundungan. Mengapa sulit mengakses draft dan naskah yang resmi adakah yang hendak disembunyikan dan di tutup-tutupi? Inilah mata najwa mana fakta mana dusta.

Hari ini, naskah undang-undang cipta kerja telah di serahkan ke presiden. Namun proses ini di warnai dengan kontropersi. Rentetan perubahan naskah undang-undang sapu sajad tersebut.

Teman-teman ini adalah naskah 812 halaman yang di serahkan ke Presiden hari ini. Dan ini adalah naskah 905 halaman yang diketok di paripurna 5 oktober lalu. Adakah yang berubah antara 2 tumpukan tinggi naskah ini atau hanya hal teknis saja. Benarkah itu?

Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan wakil ketua DPR, yang juga politikus partai Golkar Aziz Syamsudin, ada juga wakil ketua badan legislasi DPR dari fraksi P3 Ahmad Baidhowi, ada anggota Baleg dari Fraksi Demokrat Benny K Harman. Serta Ahli hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mukhtar.

Selamat malam bapak bapak. Terima kasih banyak sudah bersedia bergabung lewat udara di Mata Najwa.

- Najwa : Saya ingin ke ketua DPR dulu, bang Aziz. Bang Aziz ini naskah yang dikirimkan hari ini 812 halaman dan yang ini diketok di DPR waktu itu anda yang memimpin rapat paripurnanya. “Anda sudah membandingkan belom antara yang ini dengan yang ini bang Aziz?”
- Aziz : Kalo membandingkan itu bagian di Panja di Badan Legislasi, kemudian itu bagian daripada kesekjenan dalam meneliti di bidang

keahlian dan pengkajian. Kita hanya mengecek administrasi sesuai prosedur atau tidak. Saya sebagai pimpinan, sebagai mengatur lalu lintas dan administrasi, saya harus percaya apa yang telah dilakukan teman yang ada di Badan Legislasi, baik itu ditingkat Rapat Panja, rapat tim perebus dan tim sinkronisasi.

Najwa : Jadi melihat sekilas saja, apakah ada perubahan atau tidak, itupun Pokoknya anda langsung teruskan saja karena hanya administratif?

Aziz : Saya hanya mengecek secara random, secara detail saya tidak mungkin mengecek satu per satu karena saya tidak ikut dalam pembahasan, tidak ikut dalam Tibus, dan tidak ikut dalam Timsi.

Najwa : Kalo hanya mengecek secara random, kenapa Anda yakin sekali menyebut tidak ada substansi yang berubah di naskah 812 halaman ini dan naskah 905 halaman itu. Keyakinan itu darimana pak Wakil Ketua DPR?

Aziz : Dari laporan dan pembicaraan saya antara pimpinan Badan Legislasi, kemudian pembicaraan saya dengan bidang keahlian dan pengkajian Kesekjenan DPR dan pembicaraan saya dengan bapak Sekjen Pak Indra,

Najwa : Tapi bahkan ketua Baleg sendiri mengakui ada penghapusan dan penambahan kata dalam ayat pada naskah yang dikirimkan kepada Presiden. Pengakuan itu muncul dalam konferensi pers kemaren, Pak Ketua Baleg berdiri di samping ada ketika bilang ada perubahan.

Aziz : Ya itu silahkan tanya dengan Pak Baleg, kalo waktu pembicaraan pada saya kan tidak, ya kalo disampaikan pada saat konferensi itu kan tidak mengenai substansi. Makanya saya di awal kan minta kalo masalah substansi, teknik, yuridis, karena saya tidak ikut terlibat langsung dalam pembahasan, yang ikut pembahasan itu teman-teman yang ada di Baleg.

Najwa : Kalo anda tidak ikut pembahasan tapi kenapa anda memberikan jaminan, Pak Wakil Ketua? Tapi anda memberikan jaminan berani sumpah jabatan bahwa tidak ada penyelundupan tidak ada pasal yang berubah padahal diakui oleh Ketua Baleg ada pasal yang berubah.

Aziz : Tadi kan saya sampaikan di awal Mbak Najwa, saya sudah mendengar dan menanyakan beberapa kali kepada Pimpinan Badan Legislasi, saya bilang ini anda yakini tidak ada yang berubah, tidak ada selundupan, “Tidak ada, ketua” , anda paraf saja semua. Setelah itu saya paraf dan pengantarnya Ibu Puan yang tanda tangan.

Najwa : Tapi saya ingin tanya apakah ada dasar hukum untuk bisa mengubah-ubah pasal yang sah diketok di paripurna?

Aziz : Secara substansi dan relaksional tidak boleh dirubah apa yang diketok.

- Najwa : Tidak boleh diubah?
- Aziz : Tidak boleh diubah, mekanisme dalam UU 12 Tahun 2011.
- Najwa : Baik, kita juga bisa tunjukkan, tidak boleh diubah. Jadi kalo ada perubahan yang nanti bisa dibuktikan dan ditunjukkan berarti sudah melanggar Undang-undang. Saya ingin lempar ke Pak Bhenika Herman. Pak Beni, saya ingat anda minggu lalu sempat bilang Undang-undang ini UU Hantu . Apakah ini salah satu contohnya Undang-undang yang hantu itu karena prosesnya seperti ini?
- Benny K. H : Begini, kita tidak bisa membandingkan mana yang asli mana yang hoax. Faktanya sejak mulai dari Timsi, Timus sampai dengan rapat kerja, pengambilan keputusan tingkat satu memang tidak ada naskahnya, padahal sesuai dengan Undang-undang pada saat rapat pengambilan keputusan tingkat satu, wajib hukumnya untuk membacakan rancangan UU tersebut. UU tersebut tidak dibagikan kepada seluruh anggota DPR. UU tersebut adalah UU atau naskah hantu yang tiba-tiba disetujui dan disahkan padahal tidak ada naskahnya. Maka seharusnya itu batal.
- Najwa : Oke, kita akan lanjutkan Bang Benny, kita harus break dulu, karena kami juga sudah membandingkan dan mengecek 2 naskah ini dan kita akan tunjukkan satu per satu setelah pariwisata. Tetap di Mata Najwa.

Dialog Mata Najwa Episode Uu Cipta Kerja Part 2 Mana Fakta Mana Dusta

- Najwa : Saya ingin langsung ke Pak Achmad Baidhowi Wakil Ketua Baleg. Pak Baidhowi, kami membandingkan naskah yang diketok di paripurna dan naskah yang dikirim ke Presiden hari ini dan kami menemukan banyak perubahan yang sifatnya substansional. Apa penjelasan anda Pak?
- A. Baidhowi : Ya, yang pertama kami ingin mengklarifikasi kalo tadi Bang Benny menyatakan bahwa tidak ada naskah ketika Panja, Timus dan Timsin. Kemudian di rapat pengambilan keputusan tingkat satu Rapat Kerja memang tidak sempat dibagikan fisik tapi hanya berbentuk file dan di akhir rapat ada penandatanganan RUU, ditandatangani oleh fraksi-fraksi.
- Najwa : Kami menemukan ada perubahan Pak Baidhowi.
- A. Baidhowi : Kan substansinya yang kita bawa ke paripurna adalah yang diputuskan di tingkat Panja.
- Najwa : Dan itu berubah dengan naskah yang dikirim ke Presiden. Kenapa berubah Pak?

- A. Baidhowi : Ya karena setelah paripurna, kita kan punya waktu 7 hari untuk mencocokkan apasih sebenarnya diputuskan oleh Panja, terkait dengan ketentuan PHK, yang kita bawa ke paripurna itu kesepakatan yang dihasilkan di Panja.
- Najwa : Kenapa tidak dimasukkan ke paripurna Pak? Kenapa tidak dimasukkan ke naskah paripurna, bukankah yang diketok di paripurna setelah itu tidak boleh diubah lagi, jadi yang diketok di paripurna dikembalikan lagi ke hasil pembahasan yang di Panja, begitu?
- A. Baidhowi : Jadi yang di paripurna itu adalah laporan yang disampaikan laporan yang dari Pimpinan Baleg, dengan catatan harus merujuk keputusan Panja.
- Najwa : Baik, jadi anda mengakui bahwa ya berubah naskahnya?
- A. Baidhowi : Secara substansi tidak boleh berubah, karena kita yang disahkan itu keputusan Panja, baru disempurnakan seperti itu.
- Najwa : Baik, saya mau tunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya di klaser ketenagakerjaan seperti yang anda tunjukkan, tapi kemudian juga klaser UU Perkebunan, di UU Lingkungan Hidup. Ada kata yang hilang, frasa “paling banyak” di pasal 156 ayat 2 itu hilang.
- Pasal 88A berisi 5 ayat, di naskah yang dikirim ke Presiden tiba-tiba jadi 8 ayat. Dan seterusnya dan seterusnya. Apa penjelasannya?
- A. Baidhowi : Jadi begini Mbak Nana, yang kita sepakati apa yang kita rumuskan di tingkat Panja itu yang kemudian dibawa ke paripurna. Jika secara substansi, rumusan substansi itu tidak sesuai dengan keputusan di Panja, maka kita perbaiki.
- Najwa : Berarti memang memperbaiki substansi padahal Undang-undang menyebutkan tidak boleh memperbaiki substansi, saya ingin lempar ke Ahli Tata Hukum Negara.
- A. Baidhowi : Bukan, substansinya kan yang kita putuskan di Panja.
- Najwa : Tetapi tidak tercermin dalam naskah yang diketok palu Pak, bukankah spesifik Undang-undang menyebut begitu diketok palu boleh tidak berubah kecuali penulisan teknis? Saya ingin lempar ke Ahli Hukum Tata Negara, bagaimana melihat ini Mas Zainal Arifin Mochtar?
- Zainal : Iya Mbak Nana, saya ingin menjelaskan secara sederhana ya. Bahwa sederhananya itu dalam sistem Presidensial Indonesia maka tahapan yang paling penting itu sebenarnya adalah pembahasan dan persetujuan. Itu berbeda dengan sistem presidensial di Amerika yang tahapan pentingnya itu di tahapan pengesahan atau penandatanganan oleh presiden. Kenapa? Karena presiden bisa Veto. Sedangkan di kita

itu presiden tidak bisa Veto. Apapun yang dibahas dan disetujui oleh DPR dengan bersama pemerintah itu langsung berlaku, karena tahapan selanjutnya itu Presiden tinggal menandatangani secara teknis, itu sebabnya logikanya kenapa tidak boleh ada lagi perubahan sama sekali setelah diketok paripurna antara persetujuan Presiden dengan DPR. Makanya kalo kita lihat misalnya kalo tadi menggunakan alasan 7 hari, saya pikir Bapak Baidhowi harusnya baca baik-baik itu Undang-undang 12 2011 pasal 72 yang mengatakan bahwa memang ada kesempatan 7 hari, tapi hanya penyesuaian teknis supaya sesuai dengan format lembaran negara itu saja. Jadi tidak boleh lagi ada penambahan kata, bahkan kalo mau paling kuatnya itu adalah tidak boleh lagi bahkan menambahkan titik dan koma, karena titik dan koma itu bisa mengubah substansi.

Najwa : Oke, saya ingin minta tanggapan anda karena tadi Wakil Ketua Baleg mengatakan bahwa itu sudah diputuskan di Panja, tapi kemudian tidak masuk dalam naskah, jadi hanya penyesuaian penyesuaian. Kalo argumennya seperti itu apakah bisa diterima?

Zainal : Berarti ada 2 hal menurut saya ya, yang pertama adalah ini Undang-undang dibuat secara tergesa-gesa, karena kan seharusnya kalo memang seperti itu dia harus diselesaikan sebelum diajukan ke paripurna bersama antara Presiden dan DPR, jadi naskah itu kalo memang kesepakatan Panja maka seharusnya semua naskah itu diselesaikan dalam format yang sudah selesai, dalam konteks yang sudah selesai baru kemudian dibawa ke paripurna. Dan di paripurna itu, itulah sebabnya kenapa harus dibagikan ke seluruh anggota DPR karena paripurna itu pada dasarnya adalah yang dihitung setiap kepala di situ, bukan lagi dihitung satu fraksi. Paripurna adalah hitungan semua anggota DPR harus memberikan suara atau persetujuan terhadap itu.

Najwa : Bagaimana Pak Baidhowi? Silahkan ditanggapi?

A. Baidhowi : Ya, saya ingin mengklarifikasi bahwa yang disampaikan Nana itu seolah-olah yang disahkan itu ghost kan begitu, padahal jelas di laporan pimpinan, bahwa yang dilaporkan adalah keputusan-keputusan yang diputuskan oleh Panja dan Rapat Kerja berikut dengan lampirannya termasuk juga catatan persetujuan dari fraksi-fraksi untuk kembali merujuk kepada keputusan di Panja, itu saya kira secara substansi yang sudah kita sepakati. Kalo kemudian dikatakan bahwa terkait ini buru-buru atau tidak. Karena gini, pembahasan di DPR itu kita diberi waktu 3x masa sidang pembahasan sebuah Undang-undang.

Najwa : Sebelum masuk kesana, saya ingin menanggapi yang kami bandingkan naskah yang anda sendiri kirimkan ke media yang anda katakan ini naskah yang diketok di paripurna, jadi naskah dari anda Pak Baidhowi yang kami bandingkan dan ini adalah naskah yang

dikirim ke Presiden hari ini. Jadi patokannya justru kami dapatkan dari anda.

- A. Baidhowi : Jadi yang ghost itu kami dikonfirmasi oleh teman-teman, itu sebelum zuhur masih pagi saya juga mendapatkan ini kan begitu, lantas kemudian itu rupanya di sekretariat itu ada kesalahan teknis. Kami sampaikan kepada media yang saya iya kan tadi itu ternyata naskahnya tidak benar, kan seperti itu.
- Najwa : Kami konfirmasi juga ke Sekjen DPR dan mengatakan ya dan soal perubahan kami juga mendapatkan konfirmasi dari Sekjen Kemenaker yang timnya terlibat dalam proses pembahasan setelah diketok dan mengatakan ya ada perubahan. Bukan hanya anda, jadi konfirmasi ke beberapa pihak. Saya ingin minta ke Pak Aziz Syamsuddin. Pak Aziz Syamsuddin, apakah anda masih tetap menjamin tidak ada perubahan melihat apa yang sudah terpampang malam ini anda masih berani untuk menjamin sumpah jabatan tidak ada perubahan substansi?
- Aziz : Saya kan sampaikan, saya pada saat tadi menyatakan bahwa yang disampaikan teman-teman itu sesuai mekanisme data beracara kemudian data Pengambilan UU 12 Tahun 2011 dan saya yakin apa yang sudah saya lakukan itu sesuai aturan. Teman-teman saya sudah tanya, “Anda yakinkah apa yang sudah anda lakukan sesuai aturan mekanisme?” , “Siap ketua, yakin” ya sudah bismillah kalo sudah yakin.
- Najwa : Ada konsekuensi hukum pidana bahkan kalo memang ada penyelundupan pasal, betul itu pak Aziz?
- Aziz : Ya sekarang silahkan saja jika Mbak Najwa atau pihak kontra yang mengatakan ini ada hal yang penyelundupan atau ada hal apa. Secara mekanisme konstitusi ada salurannya silahkan, ada fakta hukum silahkan lapor ke polisi bahwa ini ada penyelundupan dan lapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan, kemudian ada yang bilang ini hantu atau apa. Toh disitu ada fakta semuanya rekamannya ada. Sesuai kesepakatan kita, saya ada tahlilan keluarga. Terima kasih.
- Najwa : Bukan prasangka Pak Aziz, kami hanya menunjukkan berdasarkan yang sudah disampaikan oleh Sekjen DPR.
- Najwa : Terima kasih Pak Aziz sudah bergabung. Oh saya tadi lupa menanyakan, nanti saya tanyakan ke Pak Baidhowi ngomong-ngomong belum juga diupload tuh naskahnya yang dikirim ke Presiden di website DPR jadi publik belum bisa melihat langsung naskah yang 812 halaman ini.

Dialog Mata Najwa Episode Uu Cipta Kerja Part 3 Mana Fakta Mana Dusta

Najwa : Saya ingin langsung ke anggota Baleg pers demokrat Bhenika Harman.

Bhenika Harman : Begini, saya ingin jelaskan ya. Itu, pembahasan itu kan di Panja. Dari Panja itu diserahkan ke Timus dan Timsin, itu hasil dari pekerja Timus dan Timsin itu dilaporkan ke Panja. Pengambilan keputusan tingkat satu harus ada naskahnya, wajib itu dan naskah itu harus dibacakan tidak hanya halaman depannya yang dibacakan dan ditandatangani. Yang terjadi adalah penandatanganan para sakingkat satu hanya bagian depan saja, yang kedua pada saat paripurna juga wajib itu dibagikan naskahnya ya.

Najwa : Oke, oke. Kalo kemudian saya ingin lempar ke Pak Baidhowi. Bagaimana Pak Baidhowi?

A. Baidhowi : Dalam rangka rapat pengambilan keputusan dalam RUU tidak ada yang dibacakan karena sudah disetujui.

Najwa : Oke. Baik saya ingin minta tanggapan Pak Zainal Arifin. Bagaimana Pak Zainal?

Zainal : Saya ingin komentar dua hal. Yang pertama kalo saya melihat kesan, DPR memandang undang-undang itu sangat tidak sacral ya, kemudian seakan akan masih bisa dipermainkan seperti di ubah. Padahal menurut saya undang-undang itu sacral. Kenapa sacral? Karena anda bisa bayangkan dengan undang-undang itu orang bisa dibunuh. Dan pembunuhan itu sah.

Dialog Mata Najwa Episode Uu Cipta Kerja Part 4 Mana Fakta Mana Dusta

Narasi Pembuka

“Pemerintah menuding aksi unjuk rasa cipta kerja dipicu oleh hoaks seputar interpretasi pasal sementara hingga ketok palu 5 oktober lalu, naskah final yang juga masih belum jelas. Sudah bergabung dengan Mata Najwa untuk membahas hal ini Menkominfo Jhonny G Plate, Direktur YLBHI Asfinawati dan Perwakilan Mahasiswa Ketua BEM seluruh Indonesia Remi Hastian. Selamat malam pak Menteri, selamat malam Asfin, selamat malam Remi”.

Najwa : Saya ingin ke pak Jhonny dulu Menkominfo. Pak Jhonny disebutkan Kominfo menemukan ada ratusan hoaks UU Cipta Kerja. Apa yang dijadikan rujukan untuk mengatakan itu hoaks pak Jhonny?

Jhonny : Ada 2 jenis hoaksnya nana, yang pertama hoaks di media sosial dan yang kedua barangkali hoaks yang dibicarakan di ruang public di luar media sosial yang sebagiannya di media sosial yang disampaikannya itu ada 42 isu hoaks yang tersebar di 547 sebaran di 5 platform digital. Di FB 61, di IG 241, di Twitter 232 di YT 11 di Tiktok ada 2 dan percakapannya itu ratusan ribu percakapannya. Percakapan itu menyangkut isu-isu yang tidak benar, yang salah di kualifikasi sebagai hoaks disinformasi. Ada contohnya:

- Video aksi pemukulan oleh polisi di Gedung DPRD kota Malang. Itu disinformasi karena tidak betul
- Jokowi kabur pura-pura tinjau tol ketika demo Omnibus Law. Itu disinformasi dan banyak sekali itu sebaran-sebarannya termasuk juga yang terkait dengan substansi yang dibicarakan undang-undang. Seperti misalnya omnibus law menghapus cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan. UU Omnibus Law hapus pesangon dan seterusnya yang menurut pemerintah mempunyai dokumen kesepakatan tingkat 1 bersama dengan Panja DPRI termasuk sector Kominfo saya mempunyai hasil kesepakatan-kesepakatan dan tahu apa perbedaan yang kami miliki yang kementerian Mensektor miliki dengan yang berkembang di ruang public atas dasar itu. Itulah yang kami kategorikan sebagai hoaks.

Najwa : Pak Jhonny, saya ingin lempar ke Direktur YLBHI Asfinawati. Asfin, Bagaimana Asfin tanggapan anda, silahkan Asfin.

Asfinawati : Kalo hoaks dikatakan disinformasi maka pemerintah sedang melakukan disinformasi. Karena menuduh orang-orang melakukan hoaks, tapi tidak memegang naskahnya, tadi kita dengar bahwa DPR baru mengatakan bahwa naskahnya baru dikirim hari ini. Penangkapan itu tidak sah, itu hoaks terbesar dan tetap dilakukan negara. Ketika Menkominfo mengatakan ada hoakas bahwa tidak ada penurunan perlindungan karena hanya mengutip satu pasal, saya sudah baca itu. Itu disinformasi, karena tenaga kerja tidak bisa dibaca satu pasal. Misalnya betul PKWT ada perlindungan tetapi apakah 2/3 tahun tidak adala lagi. Di Undang-undang yang lama, ada jeda, batas 3 tahun, nah sekarang tidak ada, sehingga orang bisa dikontrak bertahun-tahun. Itu baru satu contoh saja, kalo kita mau taruh pasal. Mari, akan terbongkar bahwa negara melakukan hoaks. Bagaimana siapa yang mau menangkap negara?

Najwa : Jadi menurut anda justru yang melakukan disinformasi justru dilakukan oleh negara?

Asfin : Jelas sekali, karena mengutipnya hanya satu pasal itu pembodohan besar, tidak bisa semua orang hukum tau tidak bisa membaca dan menegrti undang-undang hanya dengan satu pasal. Misalnya nih ya misalnya pasal 65 dihapus itu tentang outsorsing akibatnya apa? Tadinya ada batasan outsorsing itu harus ada kegiatan utama, ada kegiatan penunjang, tidak menghambat produksi secara langsubg itu tidak ada lagi. Sekarang apa? Diserahkan kepada peraturan pemerintah. Apakah kita tahu apa yang dimaksud outsorsing dalam peraturan pemerintah? Ya gak tahu orang belum ada. Jadi itu bisa apapun jadi ketika ada orang-orang menafsir bahwa saya mungkin akan dikontrak seumur hidup. Sangat mungkin, karena 3 tahun tidak ada. Ketika UU 13 2003 menyebutkan

batas 3 tahun banyak perusahaan mengakali sehingga orang bisa dikontrak 6 tahu, 10 tahun, bahkan seumur hidup.

Najwa : Baik, saya ingin lempar ke Remi ketua BEM seluruh Indonesia, Remi Hastian. Remi apakah mahasiswa berdemonstrasi karena terpengaru atau terkena disinformasi, termakan hoaks karenanya kemudian Memprotes UU Cipta Kerja ini?

Remi : Baik, izin masuk ya Mbak Nana

Najwa : Silahkan

Remi : Sebelumnya saya menyatakan mewakili mahasiswa Indonesia, dan juga elemen masyarakat yang masih berjuang pada saat ini untuk menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja. Sebenarnya apa yang kita sampaikan dan melihat jika pemerintah pada saat ini. Tadi Menteri menyampaikan bahwasanya hoaks sudah adan mungkin saya menyampaikan alurnya saja ya. Bahwasanya UU Cipta KErja belum sepenuhnya final sehingga ketika laur tersebut setelah itu ada demonstrasi besar-besaran dan selanjutnya lagi pak Jokowi mengatakan kepada Publik bahwasanya ini adalah hoaks dan juga disinformasi masyarakat termakan hoaks maslaha UU Cipta Kerja ini. Selanjutnya draft ini belum diberikan kepada Presiden. Yang jadi pertanyaan adalah darimana pemerinta tahu ini hoaks? Walaupun kita memahami perintah tahu mana yang hoaks dan tidak. Dan selanjutnya setelah pemerintah tahu ini hoaks ada penangkapan orang-orang yang menyebarkan hoaks. Pertanyaan saya adalah ada;ah tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh mbak Asfina. Pemerintah atau negara pada saat ini adalah merele;ah yang menciptakan hoaks dan disinformasi. Kenapa karena masyarakat menyampaikan penolakan penolakan UU Cipta Kerja. Mereka pun menyampaikan dengan tegas bahwasanya penolakan-penolakan itu terjadi ketika pemerintah tidak mampu untuk menyampaikan informasi secara jelas terbuka dan juga akuntabel.

Najwa : Baik, Silahkan pak Jhonny ditanggapi.

Jhonny : Saya kira keliru itu, dua-duanya keliru. Tidak tepat sekali, pemerintah pasti dengan akuntabilitas yang tinggi dan pruden dokumen menyampaikan itu. Yang tidak perlu saya sampaikan disini tetapi bahwa saya underthingking yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah dengan akuntabilitas yang tinggi, mengapa ini? Karena itu memang hoaks. Kalo pemerintah sudah bilang itu hoaks, ya dia hoaks. Kenapa membantah lagi? Dan ini untuk kepentingan. Ingat Nana saya tidak ingin terjebak di sonsul yang sangat teknis seperti ini. Ingat ya Nana Indonesia ini mempunyai 2 kali reformasi structural bidang ekonomi dan 20 tahun terakhir. Reformasi structural yang pertama itu terjadi tahun 1998 pada saat krisis moneter dimana aturan-aturan yang fundamental disiapkan warga multilateral yang mengharuskan Indonesia melaksanakannya pada saat itu. Sekarang ini reformasi structural yang kedua dimana itu pak Jokowi betul-betul memperhatikan Reformasi Struktural ekonomi untuk kepentingan UMPKM Koperasi dan tenaga kerja Indonesia. Untuk kepentingan generasi kita sekarang ini. Jangan-jangan 2 orang tadi yang menyebar hoaks.

Najwa : Pak Jhonny saya harus potong karena kita harus break tapi saya tadi tertarik ketika anda bilang pokoknya versi pemerintah lah versi yang tepat. Tadi anda katakana seperti itu. Nanti saya akan minta tanggapan dari Asfin soal itu. Jadi pokoknya yang hoaks kalo pemerintah menyebutkan itu hoaks berarti itu hoaks. Kita akan bahas setelah pariwisata.

Dialog Mata Najwa Episode Uu Cipta Kerja Part 5 Mana Fakta Mana Dusta

Najwa : Saya ingin langsung ke Direktur YLBHI Asfinawati untuk menanggapi apa yang disebutkan oleh Menkominfo pak Jhonny G. Plate. Silahkan Asfin jadi hoaks itu kalo disebut pemerintah bahwa itu hoaks.

Asfin : Ciri-ciri orang melakukan disinformasi adalah

1. tidak berani main di detail, tadi pak Jhonny tidak mau memasuki pasal-pasal detail. Mungkin karena tidak membaca,
2. argumennya pasti “pokoknya” dan tidak mau masuk ke deliberasi masuk ke pasal-pasal.
3. Mengancam
4. Sengaja tidak mau mengangkat hal yang lain. Yadi argumennya untuk negara. Pak Jhonny sudah baca belum ada royalty kemungkinan 0 % untuk tambang batu bara. Siapa yang punya tambang batu bara di Indonesia? Nanti kita liat siapa aja itu. Ada juga soal tadi misalnya hoaks kata negara hoaks tidak ada perbedaan di dalam draft misalnya pasal 69 ayat 2 tentang larangan pembukaan lahan dengan membakar di 1035 halaman itu dikatakan emperhatikan dengan sungguh kearifan local di daerah masing-masing. Di 812 dikecualikan bagi masyarakat melakukan kegiatan yang dimaksud dengan sungguh-sungguh memperhatikan kearifan local di daerah masing-masing itu cukup berbeda, yang 812 sangat dijit. Yang 1035 bisa ditafsirkan. Jadi siapa yang melakukan hoaks? Kalo tidak mau ada tuduhan hoaks mari kita berdebat, saya kepingin tau apakah pak Jokowi dan jajarannya betul-betul membaca berbagai draft versi RUU itu?

Najwa : Silahkan pak Jhonny, anda sudah membaca dan anda berani berdebat secara detail yang anda katakana hoaks tadi?

Jhonny : Oh iya nana, jelas sekali dong. Tugas Kominfo menurut Undang-undang IDE itu mengkategorikan itu amanat undang-undang. Lalu terkait dengan substansinya memang saya sudah menyampaikan untuk kementerian supaya mau debat detail ya, debatlah dengan Menteri sector masing-masing. Sehingga itu betul-betul akuntabel. Yang pertama pada saat pembahasan undang-undang ini kalo saya tidak salah ya, pembahasan panja tingkat 1 itu dilakukan secara terbuka. Kalo mau debat waktu itu katanya hebat, waktu itu debatnya lagi dibahas. Kalo pemerintah saya bukan umum. Saya menyampaikan kebijakan kebijakan negara dengan nana saya sampaikan

kalau terkait dengan hoaks versi pemerintah itu pasti benar. Tidak nana. Terkait dengan undang-undang ini memang pemerintah adalah bahagian dari UU yang membahas itu sehingga mengetahui mana yang berkembang yang tidak sesuai pembahasannya. Itulah dikategorikan karena pengkategorian hoaks disinformasi bukan asal stempel itu melalui pendalaman penelitian dokumen. (pak Jhonny terus berbicara tanpa memberikan kesempatan untuk yang lain bicara dan menanggapi).

- Najwa : Pak Jhonny maaf, boleh satu-satu dulu pak Jhonny?
- Jhonny : Saya mau sampaikan memperdebatkan tenaga kerja, jangan terjebak secara myopia ya. (masih dalam keadaan berbicara terus menerus)
- Najwa : Baik, sebelum melebar terlalu jauh, saya ingin memberikan kesempatan kepada Asfin untuk menanggapi.
- Asfin : Pak Jhonny ini kalo dibantah, tidak memberikan orang lain kesempatan ngomong ya.
- Najwa : Iya, silahkan Asfin
- Asfin : Iya, kalo kebijakan teknis tidak mau lihat detail pakai apa? Pempidanaan itukan pakai pasal detail, pakai ayat detail, dan pada saat itu polisi belum memegang naskahnya, karena naskahnya baru dikirim hari ini. Rakyat bisa mati di penjara kalo gak melihat fakta detail. Itu persoalannya, kemudian soal covid, kami justru mendorong pemerintah dan DPR untuk memperhatikan covid. Jangan lupa omnibus law ini disebut dalam pidato presiden oktober lalu sudah ada covid oktober 2019? Gak ada, jadi ini bukan untuk menjawab covid, jangan melakukan disinformasi. Itu yang kita maksud, dan misalnya kalo kita lihat pak Jhonny saya mau tanya pada bapak, royalti di tambang 0% itu untuk siapa? Royalti di tambang 0 % itu untuk rakyat, untuk pemerintah atau pengusaha? Atau oligarki?
- Jhonny : (dipotong oleh pak Jhonny) mohon maaf saya harus jelaskan. UU ini bukan karena covid, UU ini dibuat jauh sebelum covid tetapi hasil lerasinya karna covid dan dampak covid. Harus dipahami secara jelas itu. (terus berbicara tanpa henti)
- Najwa : Oke, baik. Silahkan Asfin.
- Asfin : Pertama pak Jhonny, kebijakan ada beda sedikit dengan Undang-Undang. UU itu bukan kebijakan. (pak Jhonny terus memotong pembicaraan Asfin).
- Najwa : Baik, kalo begitu saya ingi lempar ke bang Zainal Arifin Mochtar Ahli Hukum tata Negara bagaimana melihat ini yang dicap hoaks sesuai Mata Najwa episode Cipta Kerja mana fakta mana dusta, bagaimana bang Zainal?
- Zainal : Saya sederhananya ingin bilang begini na, bayangan saya kenapa kemudian terjadi hoaks, penyebab utamanya kan harus dicari dan menurut saya penyebab utamanya adalah tertutupan. Tertutupan dan ketiadaan sosialisasi yang baik. Otang tidak tau yang ana naskah Undang-undang yang aslinya sehingga orang kemudian barangkali berpatokan dengan naskah awal

yang 1028 atau kemudian naskah-naskah yang beredar di public dan itu tidak terverifikasi. Kenaoa itu tidak terverifikasi karena memang tidak ada naskah aslinya. Jadi, menurut saya ketertutupan itulah yang menjadi awal dari disinformasi. Yang kedua, walaupun sudah ada pendirian pemerintah lalu kemudian ada, tapi kemudian belum ada UU nya, menurut saya pendirian pemerintah belum tentu mewakili isi undang-undang, karena UU nya itu baru dikirimkan tadi. Dan walaupun ada undnag-undangnya kita harus tau bahwa adanya namanya penafsiran dan perdebatan terhadap sebuah pasal, apalagi kalo pasalnya itu kemudian mendelagasikan peraturan lebih lanjut.

Najwa : Maaf saya potong, anda mau mengatakan penafsiran terhadap undang-undang yang mungkin saja berbeda itu sebetulnya tidak bisa masuk kategorisasi dusta atau hoaks?

Zainal : Ya sulit untuk dimasukkan karena memang ketidakjelasan lalu kemudian penafsiran itu bisa berbasis masing-masing seperti yang dikatakan Asfin tadi. Yang ketiga adalah saya membayangkan begini dalam ketiadaan informasi, disinformasi, sosialisasi yang kurang, negara itukan tidak boleh menjadi stopper, tapi harusnya menjaid helper. Dia tidak berfungsi memberikan cap dan memutuskan bahwa itu hoaks. Harusnya kan yang dia cari bagaimana cara helper yaitu menolong masyarakat lalu kemudian memberikan fakta informasi yang detail, ungkapan yang jelas jadi bukan langsung mengecap bercorak stopper disbanding bercorak yang seharusnya yaitu helper.

Najwa : Baik, kita akan kembali setelah Pariwisata. Tetap di Mata Najwa.

Dialog Mata Najwa Episode Uu Cipta Kerja Part 6 Mana Fakta Mana Dusta

Pemerintah tahu siapa yang Demo, tahu siapa yang menggerakkan, tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayai, pemerintah sudah tahu tokoh-tokoh intelek dibalik penggerak demo. Saya ingin langsung mengklarifikasi pernyataan Pak Erlangga itu kepada Menkopolhukam Pak Mahfud MD yang sudah berada di ujung layar.

Najwa : Pak Mahfud, Selamat malam pak sehat-sehat bapak

Mahfud : sehat Najwa Alhamdulillah, saya datang nih nanti kamu wawancara dengan kursi kosong nanti.

Najwa : ngomong-ngomong kursi kosong titip salam Ya Pak sama Pak Menteri terawan ditunggu di Mata Najwa (Sambil tersenyum) . salam manis. Pak Mahfud, Saya ingin kembali ke tadi Pak Yang jelas Pak Erlangga mengatakan mengetahui kemudian Pak Prabowo menhan bilang curiga ada asing, Pak Luhut bilang ditunggangi oleh orang yang punya Ambisi kekuasaan. sebetulnya dari mana berbagai hal yang mendasari pernyataan-pernyataan ini Pak Mahfud?

Mahfud : informasi intelijen, kita sudah punya. siapa bertemu siapa Oma ngomong apa. di mana. itu ada dan sekarang sudah mulai kan ditangkap itu dan masih akan berlanjut. saya sudah instruksikan kalau yang melanggar hukum itu supaya ditindak secara hukum dan tidak ada kompromi politik lagi kali ini

saya bilang begitu. yang hukum tegas nanti biar dilihat di depan publik Buktinya apa. misalnya ada yang berspekulasi misalnya itu karena meretweet beritanya Pak Mahfud nggak ada itu. itu mencari-cari cara aja supaya membelokkan fakta.

- Najwa : yang jelas kan memang aparat kepolisian sudah menangkap. sejumlah aktivis kami pak , dan disebutkan sangkaannya itu ujaran kebencian , penghasutan yang terkait demo yang menentang cipta kerja yang kemudian akhirnya naik jadi ketika Anda di awal menyebutkan pemerintah akan memproses hukum aktor demo ini salah satunya?
- Mahfud : iya, kan sudah di awal sebelum demo itu sendiri Kita sudah punya data-data siapa yang berbicara apa, menginstruksikan Apa itu kan gunanya intelijen dan intelijen itu di setiap negara ada ada dan sah secara hukum gitu, kecuali nanti berbohong, kita lihat aja pembuktiannya ada di pengadilan nanti. sebelum ada penangkapan kan sudah saya omongkan bahwa ada aktor aktor yang melakukan itu itu ada pelaku lapangan. aktor pelakunya ada dua. 1.Yang memang murni ingin menyampaikan aspirasi. 2. yang memang menumpang dan menunggangi dan membiayai .
- Najwa : okeh, pak Mahfud yang jelas sempat ramai juga seolah-olah ada tudingan kepresiden ke 6 SBY berada dibelakang demo buruh dan mahasiswa yang menolak undang undang omnibuslaw ini. sempat anda diminta untuk mengklarifikasi tudingan itu pak Mahfud.
- Mahfud : ia betul, mas andi ari pakde saya itu dijogja junior saya minta saya klarifikasi katanya pak luhut, kemudian pak erlangga, kemudian pak Mahfud harus mengklarifikasi adanya tuduhan bahwa SBY menunggangi dan membiayai itu kalo tidak, tidak akan pernah ada kestabilan politik. saya katakan apa yang harus di klarifikasi kita tidak pernah bilang SBY di mana dan kapan kalo ada, tunjukan. akan saya selesaikan siapa dari pemerintah yang bilang itu. pemerintah tidak pernah menyebut nama SBY.
- Najwa : okeh, saya ingin lempar ke benny K harman petinggi demokkrat. pak benny, ketika pak SBY melakukan klarifikasi soal mengklarifikasi fitnah itu sesungguhnya siapa yang pertama kali mengatakan dan kemudian ditangkap oleh pak SBY sehingga mengklarifikasi itu pak benny?
- Benny : ya saya ingin menjelaskan mbak nana ya. maka, mulakan pemerintah menjelaskan bahwa aksi demo tanggal 28 itu ada yang mendalangi, ada yang menggerakkan dan membiayai. lalu dimedsos ada yang menyebutkan nama presiden ke 6. coba bayangkan, pemerintah membiarkan, seharusnya jika ada berita yang tidak betul itu ambil langkah dong, ambil tindakan dong bukan salah publik juga kalo ada pandangan, penilaian ini omongan pemerintah ini tujuannya bisa saja yangdimaksudkan itu ke presiden ke6. oleh sebab itu kita butuh penjelasan, pemerintah produsen terbesar hoax.
- Najwa : baik pak benny maaf saya harus potong anda. silahkan pak Mahfud, pak Mahfud bagaimana?
- Mahfud : apa yang harus saya klarifikasi? kami tidak pernah bilang ada nama pak SBY dibelakang itu yakin saya hadur.
- Najwa : kalo tadi point tadi pak benny bahwa negara membiarkan disinformasi itu hoax itu terjadi sehingga kemudian bisa disimpulkan mungkin saja negara

produsen hoax terbesar tadi anda katakan seperti itu pada pak benny pak Mahfud.

Mahfud : ya lapor saja yang merasa dirugikan, itukan saya tidak tau menahu saya mengklarifikasi apa pemerintah menyebut pak SBY. yang menuduh pak SBY itu tanjung, yalaporkan aja tanjung itu.

Najwa : baik, tapi pemerintah sudah membuat list begitu, sudah memantau mana yang memang aktor aktornya dan aktor aktor ini menunggangi aksi. elemen yang mana karenakan kita tau ada banyak elemen yang berdemo tentang UU cipta kerja. ada mahasiswa, ada buruh, ada aliansi nasional anti komunis Indonesia, kemudian ada elemen kami. yang mana yang ditunggangi pak?

Mahfud : jadi. aktor itu ada aktor yang baik yang baik itu adalah serikat-serikat buruh yang mau memang memperjuangkan hak buruh. itu saya minta polisi untuk dilindungi, habis habis itu. tapikan kemudian ada kekacauan dimana mana yang melempari polisi dengan botol, ada yang nari nari depan polisi agar polisinya emosi. ada yang ketangkap membawa ketapel, membawa parang, dan sebagainya, ada yang membakas nah itukan ada aktornya tidak mungkin tidak ada aktornya nah itu yang kita list, siapa yang menggerakkan, siapa dan dimana pertemuannya tanggal berapa melalui media apa. uangnya berapa bahkan kita tau.

Najwa : kita harus break dulu akan kembali setelah pariwisata.

Dialog Mata Najwa Episode Uu Cipta Kerja Part 7 Mana Fakta Mana Dusta

Najwa : Saya ingin langsung ke Asfinawati Asfin silahkan ditanggapi pernyataan menkomenpolhukam tadi soal pemerintah yang sudah mengidentifikasi lewat informasi intelegen yang kemudian sudah melist aktor aktor yang kemudian kita lihat ada penangkapan yang dilakukan. Tanggapan anda.

Asfin : ya koma kita jangan mengecilkan aksi ini bahwa walaupun ada pertarungan elit itu tidak bisa menutupi fakta bahwa banyak masyarakat, banyak rakyat yang aksi karena paham.

Najwa: pak Mahfud, tanggapan anda spesifik soal kekerasan dilakukan aparat pak.

Mahfud :

Asfin :

Najwa : baik oke, saya ingin lempar ke remi terakhir. Remi ketua BEM seluruh Indonesia remi hestian.

Remi: mengaburkan substansi

Najwa: terima kasih remi, sudah mewakili bem seluruh Indonesia di mata najwa. Terima kasih juga kepada Mahfud MD, pak jonny G. Plate. terima kasih kepada pak benny K harman, kepada pak zainal Arifin mukhtar dan kepada asfinawati. Sudah bergabung di mata najwa malam hari ini. Terima kasih paling besar kepada pemirsa yang sudah menonton semoga sehat terus teman teman selamat malam. Sampai jumpa.

Narasi penutup episode

Untuk pertama kalinya disepanjang sejarah kita,
debat legislasi dikacaukan versi naskah yang
Beraneka.

Silang argumentasi pasal pasal yang hendak diurai
Di interupsi debat teknis versi mana yang dipakai

Sungguh sayang undang undang yang amat krusial
digerogoti perkara penting procedural
Sungguh sulit untuk menukik ke jantung persoalan

Jika tata laksana tampak begitu berantakan.
Memang mustahil bisa menyenangkan seluruh golongan
Tapi menulikan diri
Mestinya tak pernah jadi pilihan

Hajat hidup rakyat adalah urutan yang sungguh mahal
Kebijakan public mesti merangkum aspirasi yang plural

Pelajaran penting betapa niat baik tidaklah cukup

Transparansi dalam urusan warga haruslah dicakup

Judicial review bukan untuk rapikan naskah berantakan

Jauh lebih baik sedari awal ditumbuhkan perdebatan

Agar undang undang yang dihasilkan bisa bermutu tinggi

Sebab mahkamah konstitusi bukanlah petugas revisi.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 67325593 Faksimile (0511) 67325593
Email: fdik@uin-antasari.ac.id Web: fdk.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN REVISI SKRIPSI

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap skripsi

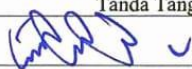



Nama : Putri Riyana

Nim : 180104010008

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Judul skripsi : Analisis Etika Komunikasi Dakwah Najwa Shihab Pada Channel Youtube Najwa Shihab (Acara Mata Najwa:Edisi UU Cipta Kerja Mana Fakta Mana Dusta)

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr.Taufiqurrahman, S.Ag., M.Ed	1. 
2. Hj. Nahed Nuwairah, S.Ag., MHI	2. 
3. Hj. Mariyatul NR., S.Ag, M.Si	3. 
4. Anwar Fuadi, MA.	4. 

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan revisi skripsi dan selanjutnya diizinkan untuk melakukan penjiplitan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 05 April 2022

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Antasari Banjarmasin

Notulis Munaqasyah



Anwar Fuadi, MA.
NIP. 198403012019031009



Dr. H. M. Abduh, MA
NIP. 19630502 199203 1005



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN ANTASARI NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI
BANJARMASIN

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN ANTASARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari, dipandang perlu menunjuk Pembimbing,
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 543 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada UIN Antasari Banjarmasin;
- Memperhatikan : Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin sebagaimana terlampir. teknik penulisan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 April 2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI,



DR. H. AKHMAD SAGIR, M.Ag
NIP. 197112171996031001

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Dosen Pembimbing.
- 3 Mahasiswa yang bersangkutan

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN
ANTASARI**

NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG

**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2021 TANGGAL
20APRIL 2021**

No	Nama / NIM	JUR	Judul Skripsi	Dosen Pembimbing
1.	Muhammad Rasad / 180104020201	BPI	Dakwah Berbasis Pengajian Kitab Kuning Di Masjid Al-Ikhwan Banjarmasin Timur	1. Dr. H. Akhmad Sagir, M.Ag 2. Drs, H. Ilham, M.AP
2.	Saleh / 170103020185	BPI	Bimbingan Keagamaan Di Yayasan Kreasi Bangun Semesta Banjarmasin	1. Muhammad Rif'at, M.Ag 2. Anwar Fuadi, MA
3.	Putri Riyana / 180104010008	KPI	Analisis Etika Komunikasi Dakwah Dalam Teknik Presenting Najwa Shihab Sebagai Publik Speaker Di Acara Mata Najwa (Episode Uu Cipta Kerja : Mana Fakta Mana Dusta)	1. Hj. Nahed Nuwairah, S.Ag., MHI 2. Hj. Mariyatul NR, S.Ag., M.Si

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 April 2021

DEKAN,-



DR.H.AKHMAD SAGIR, M.Ag

NIP.197112171996031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250771 Faksimili (0511) 3254344

Fdkuinantasari2017@gmail.com

SURAT KETERANGAN SEMINAR

Nomor: /Un.14/III.4/PP.00.9/05/2021

Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, menyatakan bahwa Saudara (i)

Nama : Putri Riyana
NIM : 180104010008
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Telah melaksanakan SEMINAR pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 30 April 2021
Judul Skripsi : **Analisis Etika Komunikasi Dakwah
Najwa Shihab di Acara Mata Najwa**

Ditunjuk sebagai :

Pembimbing I : Nahed Nuwairah, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Hj. Mariyatul NR, S.Ag., M.Si
Moderator/Notulen : Najla Amaly, M.Med.Kom

Demikian surat keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 25 Mei 2021



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin
2. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250771 Faksimili (0511) 3254344
Fdkuinantasari2017@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at, bertepatan tanggal 30 April 2021 via Google Meet, telah dilaksanakan Seminar

Desain Operasional Skripsi mahasiswa(i) Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi. Dimulai dari pukul : 09.00 (Wita)

Berakhir pada pukul : 10.00 (Wita)

Identitas yang maju SEMINAR pada hari ini Saudara(i):

Nama : Putri Riyana




NIM/Jurusan : 180104010008/KPI

Judul : **Analisis Etika Komunikasi Dakwah dalam Teknik Presenting Najwa Shihab Sebagai Publik Sepaker di Acara Mata Najwa (Episode UU Cipta Kerja: Mana Fakta Mana Dusta)**

Berdasarkan hasil tanggapan dan jawaban oleh yang maju seminar, diberikan catatan sebagai berikut:

1. Kajian teori memuat kata kunci judul etika komunikasi dakwah, pembahasan tentang teori public speaking pada ranah etika komunikasi dan sesuaikan dengan pedoman
2. Perhatikan kata-kata public speaker dan public relation, dipahami terlebih dahulu
3. Definisi operasional tambahkan terkait etika komunikasi, terkait acara mata najwa yang di teliti
4. Footnote diperbaiki
5. Teknik analisis video perlu dijabarkan percakapannya, dan gestur presenter dideskripsikan
6. Judul dan metode disesuaikan
7. Rumusan masalah disederhanakan menjadi 1 saja
8. Jika ada banyak istilah-istilah yang ditulis di proposal harus dijelaskan
9. Judul diubah, dengan menghapus UU cipta kerja mana fakta mana dusta, menghapus dalam teknik presenting, dan menghapus public speaker

Diseminarkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 April 2021

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nahed Nuwairah, S.Ag., M.HI	Pembimbing 1	
2.	Hj. Mariyatul NR, S.Ag., M.Si	Pembimbing II	
3.	Najla Amaly, M.Med.Kom	Moderator	

Diketahui Oleh
Ketua Jurusan KPI,



Mariyatul NR.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3250771 Faksimili (0511) 3254344
 Fdkuinantasari2017@gmail.com

Nomor : 1762/Un.14/III.4/TL.01/11/2021

Banjarmasin, 11 November 2021

Lamp. : -

Perihal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth. :

1. Kepala Pusat Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

2. Kepala Pusat Perpustakaan FDIK UIN Antasari Banjarmasin

di - Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Putri Riyana**
 NIM : 180104010008
 Program Studi : Strata Satu (S-1)
 Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jl. Kelurahan Rt/Rw 012/003 Kel. Landasan Ulin, Kec. Liang Anggang
 Kab. Banjar Baru

Akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

Analisis Etika Komunikasi Dakwah Najwa Shihab Pada Channel Youtube Najwa Shihab

dengan ketentuan :

Lokasi Penelitian : Media Youtube. Lama Penelitian
: 1 (Satu) Bulan

Mulai tanggal : 11 November 2021 s.d. 11 Desember 2021

untuk kelancaran pelaksanaannya, kami memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr kiranya dapat memberikan izin terhadap riset tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, Atas perkenan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

Akhmad Sagir,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

B-070/Un.14/V.1/HM.02.2/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putri Riyana
NIM : 180104010008
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jurusan : KPI

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 11 November 2021 sampai dengan 11 Desember 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 Desember 2021

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag

NIP. 19710821 199703 1 003

Catatan : **Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
PERPUSTAKAAN**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.14/III.4/PP.00.9/33/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, menerangkan bahwa:

N a m a	: Putri Riyana
N I M	: 180104010008
Fakultas	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Program/Jurusan	: S.1 / KPI
Semester	: VII (Tujuh)

telah selesai melakukan riset / penelitian ilmiah di Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan skripsi dengan judul : **Analisis Etika Komunikasi Dakwah Dalam Teknik Presenting Najwa Shihab Sebagai Publik Speaker di Acara Mata Najwa** mulai tanggal 11 Nopember s.d. 11 Desember 2021.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Banjarmasin, 14 Desember 2021

Kepala Perpustakaan



Me Hilmi Zam, S.Sos, S.IPI

BIODATA

1. Nama Lengkap : Putri Riyana
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Landasan Ulin Barat, 17 Mei 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Kelurahan Gg. Meranti 3, RT.12. Liang Anggang
7. Pendidikan :
 - a. 2006-2011 MI. Baladan Amina
 - b. 2011-2014 MTsN 1 Banjar
 - c. 2014-2018 MAN 3 Banjar
 - d. 2018-2022 UIN Antasari Banjarmasin
8. Orang Tua :

Nama Ayah : Surianur

Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

Alamat : Jl. Kelurahan Gg. Meranti 3, RT.12. Liang Anggang

Nama Ibu : Nurliana

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Kelurahan Gg. Meranti 3, RT.12. Liang Anggang
9. Saudara (jumlah saudara) : 4